



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**HASIL EVALUASI KINERJA PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN BUKU 2023**

**NOMOR : PE.09.03/LHP-193/PW14/4/2024
TANGGAL : 30 September 2024**



EVALUASI KINERJA TAHUN 2023



PERUMDA ANEKA USAHA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TINGKAT KINERJA

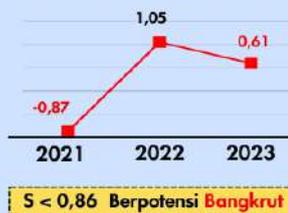


Kenaikan kinerja pada Aspek Keuangan:
 >> Pendapatan Usaha 2022 : Rp 2.067.541.785
 >> Pendapatan Usaha 2023 : Rp 5.141.517.680

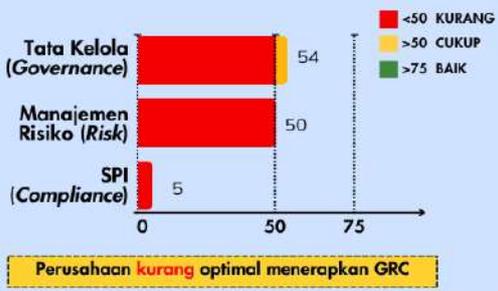
Penurunan kinerja pada Aspek Operasional:
 >> Indeks Kepuasan Pelanggan : 88%
 >> Indeks Kepuasan Pelanggan : 72%

GOING CONCERN

SPRINGGATE ANALYSIS



PENERAPAN GRC



ISU STRATEGIS

Operasional Perusahaan

4 dari 10 Unit Usaha berhenti/belum/tidak beroperasi



Indeks Kepuasan Pelanggan



Pemanfaatan Teknologi Informasi telah optimal

2 Teknologi

- Usaha Parkir
- Uji Mutu Kratom

2 Aplikasi

- Usaha Travel
- Usaha ATK

3 Digital Marketing

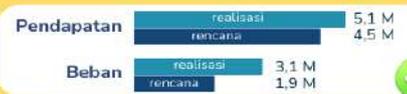
- Lumbung Pangan
- Sewa Kios
- Armada Air

KONTRIBUSI FISKAL



Target RKAP telah Tercapai

Realisasi Pendapatan: 113,5%
 Realisasi beban: 158,7%



Pengelolaan SDM tidak efektif

- Tidak Ada Target Key Performance Indicator
- Kebutuhan SDM dalam Analisis Beban Kinerja tidak sesuai dengan SOTK
 - Terdapat jabatan kosong dan terjadi tumpang tindih



REKOMENDASI

➤ Efisiensi dan pengendalian biaya operasional

➤ Evaluasi hambatan dan strategi peningkatan kinerja keuangan

➤ Perencanaan dan pengembangan unit usaha serta perbaikan fasilitas unit usaha

➤ Penganggaran biaya pelatihan bagi SPI, Penetapan pengelola manajemen risiko

➤ Peningkatan komitmen seluruh pegawai dan dewas dalam penerapan GRC

➤ Penyesuaian Struktur Organisasi sesuai ABK

➤ Penyusunan strategi bisnis untuk kebermanfaatn terhadap masyarakat

➤ Penyusunan indikator dan target kinerja Perusahaan dan masing-masing pegawai

HELPDESK ONLINE BPKP KALIMANTAN BARAT

(0561) 712427

kalbar@bpkp.go.id



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Gunakan alat dari BSrE untuk verifikasi. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."



DAFTAR ISI

BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI	2
A. Simpulan.....	2
B. Rekomendasi	2
BAB II URAIAN HASIL EVALUASI.....	4
A. Dasar Evaluasi.....	4
B. Tujuan dan Sasaran Evaluasi	5
C. Batasan Tanggung Jawab	5
D. Metodologi Evaluasi.....	5
E. Informasi Umum.....	6
1. Uraian Ringkas Perusahaan.....	6
2. Tujuan dan Fungsi Perusahaan	7
3. Struktur Organisasi.....	7
4. Laporan Keuangan Perusahaan	8
F. Hasil Evaluasi Kinerja	9
1. Perspektif Kinerja	9
2. Analisis Kinerja	11

Lampiran:

1. Neraca
2. Laporan Laba Rugi
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Penilaian Kinerja Keuangan, Operasional, dan Administrasi
5. Penilaian *Governance, Risk, and Control*
6. Target dan Realisasi atas RKAP
7. Analisis Beban Kerja
8. Rencana Aksi dan Komitmen Tindak Lanjut





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak 78124
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428
Surel: kalbar@bpkp.go.id Situs: www.bpkp.go.id

Nomor : PE.09.03/LHP-193/PW14/4/2024 30 September 2024
Lampiran : Delapan Berkas
Hal : Hasil Evaluasi Kinerja pada Perumda
Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Buku 2023

Kami telah melakukan evaluasi kinerja pada Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Perusahaan, untuk Tahun Buku 2023. Evaluasi didasarkan pada data yang diberikan oleh Perusahaan pada saat evaluasi dilakukan serta Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh auditor independen.

Menurut pendapat kami, Perusahaan dalam kategori “Kurang Sehat” dengan nilai 56,10. Beberapa hal yang memerlukan perbaikan segera adalah manajemen Perusahaan belum menerapkan tata kelola yang baik, belum secara efektif menerapkan manajemen risiko, dan belum mengoperasikan Satuan Pengawas Intern dengan baik.

Secara lengkap kami uraikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: SIMPULAN DAN REKOMENDASI

BAB II: URAIAN HASIL EVALUASI



BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Perusahaan belum menetapkan *Key Performance Indikator* dan target kinerja.
2. Kinerja keuangan Perusahaan mendapat nilai 34,50 atau 49,29% dari nilai maksimal sebesar 70. Indikator dengan capaian belum maksimal adalah *Return On Equity (ROE)*, *Return On Investment (ROI)*, perputaran total aset, dan rasio total modal sendiri terhadap total aset.
3. Kinerja operasional mendapat nilai 11,60 atau 77,33% dari nilai maksimal sebesar 15,00. Terdapat ketidakpuasan pelanggan, unit usaha yang tidak aktif, serta kegiatan penelitian dan pengembangan yang tidak berjalan.
4. Kinerja pada aspek administrasi mendapat nilai 10,00 atau 66,67% dari nilai maksimal sebesar 15.
5. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance (GRC)* masih dalam kategori “Kurang”, yaitu tata kelola Perusahaan yang baik belum terbentuk. Hal ini terlihat dari belum tampaknya komitmen, tim yang menangani ketaatan GCG, serta kebijakan dan mekanisme pengaduan. Risiko juga belum dikelola dengan baik karena belum terdapat struktur dan kebijakan penanganan risiko. Selain itu, Satuan Pengawas Intern (SPI) yang telah ditetapkan belum dapat menjalankan tugas dengan baik.
6. Keberlangsungan usaha Perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan (*Audited*) tahun 2021 sampai dengan 2023 menunjukkan bahwa Perusahaan berisiko tinggi mengalami kebangkrutan.
7. Perusahaan belum mampu berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.
8. Realisasi pendapatan usaha Perusahaan telah mencapai 113,48% dari target, tetapi realisasi beban usaha juga meningkat, yaitu mencapai 158,70% dari anggaran yang telah ditetapkan.

B. Rekomendasi

Direktur Perusahaan agar menjalankan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Perusahaan dan menjalankan rencana aksi yang disepakati sebagaimana terlampir, yaitu:

1. Penetapan indikator dan target kinerja untuk setiap jenjang pegawai.



2. Perbaiki kinerja melalui efisiensi dan pengendalian biaya operasional Perusahaan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan unit usaha serta perbaiki fasilitas dan layanan unit usaha.
3. Peningkatan GRC dengan:
 - a) Peningkatan komitmen seluruh pegawai dan penyusunan infrastruktur tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
 - b) Penetapan pengelola risiko.
 - c) Penganggaran biaya pelatihan pegawai terkait penerapan GRC.
4. Pengevaluasian hambatan dan strategi peningkatan kinerja keuangan.
5. Penyusunan strategi bisnis dalam rangka peningkatan pendapatan yang dapat memberi kebermanfaatn pada masyarakat.
6. Penetapan struktur organisasi sesuai dengan analisis beban kerja dan susunan Direksi terbaru.

Langkah-langkah strategis tersebut beserta rencana aksinya akan meningkatkan kinerja Perusahaan.

Demikian kami sampaikan. Laporan ini terbatas hanya ditujukan bagi penerima laporan untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan/rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.

Atas perhatian dan tindak lanjut yang dilakukan, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Rudy M. Harahap

Harap tidak mencetak dokumen ini, kecuali sangat diperlukan. Dokumen yang tidak dicetak akan menyelamatkan lingkungan. Layanan Pengaduan: Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada wbs.bpkp.go.id atau menghubungi 085210991239.



BAB II

URAIAN HASIL EVALUASI

A. Dasar Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Manajemen Penugasan Pengawasan di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
5. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja BUMD Aneka Usaha.

dengan memperhatikan:

1. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PR.00/KEP-582/K/SU/2023 tentang Agenda Prioritas Pengawasan dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah Tahun 2024;
2. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara nomor PE.09.02/S-842/D4/05/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Kinerja BUMD Aneka Usaha, *Self Assesment* Kinerja BUMD Aneka Usaha, dan *Profiling* Badan Usaha;
3. Surat Direktur Perumda Aneka Usaha nomor 104/DU-PDAU/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 hal Permohonan Audit Kinerja Tahun Anggaran 2023; dan
4. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat nomor PE.09/02/ST-378/PW14/4/2023 tanggal 11 Juli 2023.

B. Tujuan dan Sasaran Evaluasi

Tujuan evaluasi adalah menilai capaian kinerja Perusahaan tahun buku 2023 dalam rangka penerapan tata kelola Perusahaan yang baik dan memberikan rekomendasi



perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja Perusahaan, dengan sasaran evaluasi sebagai berikut:

1. Menilai capaian kinerja Perusahaan, meliputi:
 - a. Aspek Keuangan.
 - b. Aspek Operasional.
 - c. Aspek Administrasi.
2. Menginformasikan hasil evaluasi, meliputi:
 - a. Analisis *going concern*.
 - b. Analisis penerapan GRC.
 - c. Analisis efektivitas pelaksanaan pengelolaan BUMD.
 - d. Capaian target dalam RKAP.
 - e. Capaian target dalam *Key Performance Indikator* (KPI).
 - f. Penerapan Analisis Beban Kinerja Pegawai.
 - g. Kontribusi Fiskal.
 - h. Identifikasi Risiko *Fraud*.
3. Menginformasikan peristiwa penting sampai saat evaluasi.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi.

Cakupan evaluasi kinerja ini adalah kinerja Perusahaan tahun buku 2023.

Evaluasi kinerja dilakukan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Standar Kerja Pengawasan Intern yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

C. Batasan Tanggung Jawab

Batasan tanggung jawab evaluasi sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi kami didasarkan pada data, informasi, dan fakta yang disampaikan kepada kami oleh manajemen Perusahaan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Laporan hasil evaluasi ini bersifat informatif dan penggunaan serta tindak lanjut atas hasil evaluasi merupakan tanggung jawab dan kewenangan dari manajemen Perusahaan dan/atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi meliputi:

1. Pengumpulan data



a. Reviu Dokumen

Reviu dilakukan terhadap dokumen yang terkait dengan capaian kinerja Perusahaan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai pendalaman lebih lanjut terhadap data yang tidak dapat diperoleh melalui reviu dokumen.

2. Pengolahan dan Analisis Data

a. Analisis Data

Analisis data secara kuantitatif dan kualitatif atas kesesuaiannya terhadap penilaian indikator kinerja Perusahaan.

b. Pemaparan

Hasil sementara evaluasi disampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi.

c. Pelaporan

Tahap akhir dari kegiatan evaluasi berupa penyusunan laporan hasil evaluasi.

E. Informasi Umum

1. Uraian Ringkas Perusahaan

a. Pendirian

Perusahaan merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat.

Perusahaan berdiri pada tahun 1988 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 tanggal 30 Maret 1988 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 539.41-829 tanggal 2 November 1989. Perusahaan menjalankan operasionalnya secara aktif sejak tahun 1996.

Pada tahun 2023, Perusahaan mengalami perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 6 April 2023.

Perusahaan memiliki izin operasional dan legalitas sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, perdagangan, penyediaan barang dan jasa



dalam arti seluas-luasnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, serta usaha dan jasa yang menguntungkan dan dapat menunjang pembangunan daerah.

b. Data Umum

Nama Perusahaan	:	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
Alamat	:	Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 103 Pontianak 78116
Telepon/Faksimili	:	Telp: 0561-762292; Faks: 0561-732614
Alamat email	:	aneka_usaha@yahoo.com
Website	:	perusdakalbar.com
Visi Perusahaan	:	Menjadi Perusahaan yang mandiri, profesional, dan berdaya saing

2. Tujuan dan Fungsi Perusahaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan adalah:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;
- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah daerah di bidang ekonomi dan perdagangan;
- c. membangun dan mengembangkan usaha dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik;
- d. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber dana yang ada dan aset yang dimiliki guna meningkatkan daya saing Perusahaan; dan
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perusahaan ditetapkan oleh Direktur Utama PD Aneka Usaha dengan mengacu kepada Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari:

- a. Badan Pengawas
- b. Sekretariat Badan Pengawas
- c. Direktur Utama
- d. Direktur Administrasi dan Keuangan, membawahi dua bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Keuangan dan Perpajakan
 - 2) Bidang Administrasi dan Personalia
- e. Direktur Teknik dan Pemasaran, membawahi dua bidang, yaitu:
 - 1) Bidang Teknik
 - 2) Bidang Pemasaran

Perusahaan belum menyusun struktur organisasi sesuai dengan susunan direksi



terbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1797/EKON/2023 tanggal 18 November 2023 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028, yaitu sebagai berikut:

- Direktur Utama : H. Syariful Hamzah Naully, S.IP., M.A.P
- Direktur : Susanti, S.H., M.M.

Untuk mengawasi kegiatan usaha Perusahaan, dibentuk Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1796/EKON/2019 tanggal 18 November 2023 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2027, dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- Anggota : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Jumlah sumber daya manusia (SDM) Perusahaan per tanggal 31 Desember 2023 sebanyak 8 orang yang terdiri dari 2 orang Direksi, 2 orang karyawan tetap, dan 3 orang karyawan kontrak, dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Direksi	Pegawai Tetap	Pegawai Kontrak	Jumlah
1.	S2 Pasca Sarjana (Magister)	1	1	-	2
2.	S1 Sarjana	1	1	3	5
3.	D III Sarjana Muda	-	-	1	1
Jumlah		2	2	4	8

4. Laporan Keuangan Perusahaan

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Jojo Sunarjo & Rekan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu pengecualian terhadap persediaan bahan baku pupuk serta pengakuan kewajiban karena belum menerapkan Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bab 23 tentang “Imbalan Kerja”, sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen Nomor 00040/2.0946/AU.2/11/0996-1/1/III/2024 tanggal 6 Maret 2024.

Perusahaan belum melaksanakan penilaian kinerja secara mandiri. Evaluasi kinerja ini didasarkan pada data yang diberikan oleh manajemen Perusahaan pada saat evaluasi kinerja dilaksanakan.



Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2023 disajikan pada Lampiran 1 sampai dengan 3.

F. Hasil Evaluasi

1. Perspektif Kinerja

Kesehatan Perusahaan dinilai berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 539/7656/SJ dan 559/7655/SJ tanggal 23 Oktober 2017 tentang Modul Penilaian Kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang kemudian menjadi acuan dalam Peraturan Deputi BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 14 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja BUMD Aneka Usaha dinilai dengan kategori sebagai berikut:

SEHAT	KURANG SEHAT	TIDAK SEHAT
AAA apabila total skor (TS) > 95	BBB apabila $50 < TS \leq 65$	CCC apabila $20 < TS \leq 30$
AA apabila $80 < TS \leq 95$	BB apabila $40 < TS \leq 50$	CC apabila $10 < TS \leq 20$
A apabila $65 < TS \leq 80$	B apabila $30 < TS \leq 40$	C apabila $TS \leq 10$

Hasil evaluasi kinerja menunjukkan bahwa kinerja Perusahaan pada tahun 2023 masuk dalam kategori "Kurang Sehat" atau "BBB" dengan nilai 56,10. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 55,30 maka terdapat kenaikan senilai 0,80, dengan nilai masing-masing aspek sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot	Capaian		Naik/Turun
			2022	2023	
1	Keuangan	70	33,50	34,50	Naik
2	Operasional:	15	11,80	11,60	Turun
	Perspektif Pelanggan		7,00	6,40	
	Perspektif Proses Bisnis		2,00	2,00	
	Perspektif <i>Learning and Growth</i>		2,80	3,20	
3	Administrasi	15	10,00	10,00	Tetap
	Jumlah	100	55,30	56,10	

Penjelasan atas capaian kinerja setiap aspek adalah sebagai berikut:

a. Kinerja Keuangan Rendah

Penilaian kinerja pada aspek keuangan meliputi rasio laba terhadap ekuitas/imbalance kepada pemegang saham (ROE), rasio laba terhadap investasi/imbalance investasi (ROI), rasio kas, rasio lancar, *collecting period*, perputaran persediaan, perputaran total aset, serta rasio total modal sendiri terhadap total aset.

Capaian kinerja Perusahaan untuk aspek keuangan tahun 2023 adalah 34,50 atau mencapai 49,29% dari nilai maksimal sebesar 70. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 1,00 dari tahun 2022 karena adanya upaya peningkatan pendapatan Perusahaan. Rincian pada Lampiran 4.



Namun, capaian pada aspek keuangan belum tinggi, yaitu dari 8 indikator yang dinilai, terdapat 4 indikator yang belum mendapat skor maksimal, yaitu ROE, ROI, perputaran total aset, dan rasio total modal sendiri terhadap total aset.

Penyebabnya, manajemen Perusahaan belum melakukan pengendalian dengan baik, yaitu realisasi pendapatan usaha mencapai 113,48% dari target dalam RKAP tahun 2023, tetapi realisasi beban usaha meningkat 158,70% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2023, khususnya pada beban operasional untuk operasi pasar Rp2.911.883.612,00 yang mencapai 57,02% dari jumlah beban usaha Rp5.107.040.602,00.

Akibatnya, terjadi penurunan laba Perusahaan.

Direksi Perusahaan agar:

- 1) Mengidentifikasi dan menurunkan biaya Perusahaan yang tidak relevan dengan kinerja Perusahaan.
- 2) Mengendalikan biaya Perusahaan yang tidak berdampak langsung pada peningkatan kinerja Perusahaan.

b. Kinerja Operasional Cukup Memadai

Penilaian kinerja Perusahaan pada aspek operasional meliputi penilaian atas tiga perspektif, yaitu perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis, serta perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (*learning and growth*), seperti tampak pada Tabel berikut:

No	Perspektif	Tahun 2022	Tahun 2023	Turun/Naik
1	Pelanggan	7,00	6,40	Turun
2	Proses Bisnis	2,00	2,00	Tetap
3	<i>Learning and Growth</i>	2,80	3,20	Naik
		11,80	11,60	Turun

Rincian pada Lampiran 4.

Skor kinerja operasional Perusahaan pada tahun 2023 adalah 11,60 atau mencapai 77,33% dari skor maksimal 15,00, yang mengalami penurunan sebesar 0,20 dari tahun 2022.

Belum tingginya capaian kinerja operasional Perusahaan dikondisikan oleh:

- 1) Ketidakpuasan pelanggan kios terhadap fasilitas dan pelayanan petugas.
- 2) Unit usaha yang dimiliki oleh Perusahaan belum seluruhnya aktif beroperasi.
- 3) Penelitian dan pengembangan unit usaha tidak dilakukan.

Penyebab lebih mendasarnya adalah:

- 1) SOP terkait kebersihan tidak dijalankan.



2) Strategi pemasaran kurang efektif dan terdapat unit usaha yang belum mendapatkan izin operasi.

3) Tidak terdapat rencana pengembangan dan inovasi unit usaha.

Akibatnya, muncul risiko penurunan penyewa kios, kesulitan menarik dan mempertahankan pelanggan, penurunan pendapatan Perusahaan, serta pengeluaran biaya yang tidak dapat diperoleh kembali.

Direksi Perusahaan agar:

- a. Meningkatkan kerapian dan kebersihan fasilitas mushola dan wastafel serta meningkatkan pelayanan petugas kepada pelanggan unit usaha sewa kios.
- b. Menetapkan rencana pengembangan, strategi pemasaran, dan inovasi unit usaha.
- c. Kinerja Administrasi Baik

Penilaian kinerja administrasi Perusahaan meliputi penilaian terhadap penyampaian administrasi kepada pihak yang berkepentingan, yang tampak pada Tabel berikut:

No	Perspektif	Tahun 2022	Tahun 2023	Turun/Naik
1	Laporan Tahunan	10,00	5,00	Turun
2	RKAP	0,00	5,00	Naik
		10,00	10,00	Tetap

Capaian kinerja Perusahaan untuk aspek administrasi tahun 2023 adalah 10,00 atau sama dengan capaian tahun 2022. Perusahaan telah menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), tetapi penyampaian Laporan Tahunan 2023 lebih lambat dibandingkan tahun 2022 meskipun masih dalam batas waktu maksimal penyampaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Analisis Kinerja

a. Penerapan *Governance, Risk, and Compliance* (GRC)

Penilaian GRC dilakukan berdasarkan nilai dan kategori sebagai berikut:

Nilai	Kategori
Di atas 75	Baik
50 s.d 75	Cukup
Di bawah 50	Kurang

Dari analisis penerapan GRC yang telah dilakukan, Perusahaan mendapat penilaian masing-masing aspek dengan rincian sebagai berikut:

Aspek	Nilai	Kategori
Tata Kelola/ <i>Governance</i>	54	Cukup
Manajemen Risiko/ <i>Risk</i>	50	Kurang
SPI/ <i>Control</i>	5	Kurang



Rincian pada Lampiran 5.

Penerapan GRC Perusahaan kurang, yang terlihat dari tata kelola yang baik dan manajemen risiko belum terbentuk serta SPI belum optimal.

Uraian hasil analisis kinerja masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

1) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Belum Terbentuk

Perusahaan belum sepenuhnya menerapkan tata kelola yang baik, yang terlihat dari belum adanya komitmen oleh Dewan Pengawas, Direksi, dan seluruh pegawai, tim penanganan ketaatan GCG belum terbentuk, dan kebijakan terkait *whistle blowing system* (WBS) atau mekanisme pengaduan pelanggaran/kecurangan tidak tersedia.

2) Risiko Perusahaan Belum Dikelola

Perusahaan telah memiliki pedoman manajemen risiko dan daftar risiko yang memuat jenis, penyebab, dampak, dan prioritas risiko. Namun, penerapan manajemen risiko Perusahaan dalam kategori kurang, yang terlihat dari belum dibentuknya pengelola risiko, kerangka kerja manajemen risiko, dan rencana penanganan risiko.

3) SPI belum berjalan optimal

SPI Perusahaan dalam kategori kurang, yang terlihat dari SPI yang telah ditetapkan belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dan belum disusunnya pedoman pelaksanaan pengawasan, rencana audit tahunan, serta SOP atas pengukuran kinerja dan anggaran.

Penyebabnya:

- a. Kurangnya komitmen Dewan Pengawas dan manajemen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- b. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia Perusahaan.
- c. Kurangnya pemahaman manajemen Perusahaan terkait pentingnya tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Akibatnya, muncul risiko kecurangan dan pencapaian kinerja rendah.

Direksi Perusahaan agar:

- a. Menyusun dan menandatangani Pakta Integritas setiap awal tahun selama masa jabatan.
- b. Menunjuk tim yang menangani ketaatan aturan GCG.
- c. Menyusun mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran/kecurangan.
- d. Menetapkan pengelola risiko dan infrastruktur manajemen risiko,



khususnya terkait dengan kerangka kerja, rencana penanganan risiko, dan pemilik risiko (*risk owner*).

- e. Memfasilitasi pegawai yang ditunjuk sebagai SPI untuk mengikuti pendidikan/pelatihan terkait pengendalian internal.
- f. Menetapkan Piagam Internal Audit, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, dan pedoman pelaksanaan pengawasan.

b. Keberlangsungan (*Going Concern*) Perusahaan

Perhitungan risiko kebangkrutan Perusahaan menggunakan model *Springate* dengan rumus:

$$S = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3 + 0,4X4$$

Keterangan:

X1 adalah modal kerja/total aset

(modal kerja = aset lancar - kewajiban lancar)

X2 adalah EBIT dibagi total aset

X3 adalah EBT dibagi utang lancar

X4 adalah Penjualan dibagi total aset

Dengan: $S > 0,862$ Perusahaan tidak berpotensi bangkrut

$S < 0,862$ Perusahaan berpotensi bangkrut

Hasil analisis keberlangsungan Perusahaan berdasarkan Laporan Keuangan (*Audited*) tahun 2021 sampai dengan 2023 menggunakan model *Springate* tersebut sebagai berikut:

No.	Uraian	2021 (<i>Audited</i>)	2022 (<i>Audited</i>)	2023 (<i>Audited</i>)
1	Aset Lancar	11.533.116.624	11.836.264.001	12.003.019.487
2	Kewajiban Lancar	328.679.251	172.850.351	172.850.351
3	Modal Kerja (1 - 2)	11.204.437.373	11.663.413.650	11.830.169.136
4	Total Aset	34.411.401.223	34.429.974.738	29.613.521.095
5	EBIT	(581.596.089)	174.393.414	32.191.511
6	EBT	(581.596.089)	174.393.414	32.191.511
7	Penjualan	1.503.202.902	2.043.507.175	5.127.965.865
8	X1 = (3/4)	0,33	0,34	0,3995
9	X2 = (5/4)	(0,02)	0,01	0,0011
10	X3 = (6/2)	(1,77)	1,01	0,1862
11	X4 = (7/4)	0,04	0,06	0,1732
12	S	(0,87)	1,05	0,6070

Tampak dari Tabel tersebut, pada tahun 2023 nilai S Perusahaan sebesar 0,607 atau kurang dari 0,862 yang menunjukkan Perusahaan berisiko tinggi bangkrut.

Direksi Perusahaan agar memitigasi risiko kebangkrutan tersebut dan menyusun strategi yang dapat menjaga keberlangsungan Perusahaan.



c. Pengelolaan bisnis Perusahaan belum efektif

Efektivitas pengelolaan Perusahaan belum sepenuhnya memadai, yang terlihat dari:

- 1) Pada tahun 2023, Perusahaan tidak menyetorkan dividen. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Pasal 87 yang menyatakan bahwa penggunaan laba Perusahaan diutamakan untuk pemenuhan dana cadangan setiap tahunnya sampai mencapai jumlah 20% dari modal dan peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayan aman umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perusahaan.
- 2) Perusahaan belum mampu menciptakan tambahan lapangan kerja di daerah karena kondisi keuangan Perusahaan yang belum stabil.

Direksi Perusahaan agar menyusun strategi bisnis yang dapat meningkatkan kebermanfaatan Perusahaan di daerah.

d. Penyusunan dan Pelaksanaan Rencana Bisnis

Perusahaan telah menyusun Rencana Bisnis Tahun 2020-2024 dan telah sesuai dengan kerangka rencana bisnis yang diatur dalam Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Pendapatan dan Beban Perusahaan tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Uraian	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Di atas anggaran/(di bawah anggaran)	
				Rp	%
Pendapatan:					
Usaha	2020	4.034.100.000	1.305.013.433	(2.729.086.567)	32,35
	2021	19.796.167.500	1.503.202.902	(18.292.964.598)	7,59
	2022	27.087.367.500	2.043.507.175	(25.043.860.325)	7,54
	2023	31.725.086.175	5.127.965.865	(26.597.120.310)	16,16
Di luar Usaha	2020	70.135.200	117.152.485	47.017.285	167,04
	2021	70.135.200	136.892.231	66.757.031	195,18
	2022	70.135.200	24.034.610	(46.100.590)	34,27
	2023	70.410.960	13.551.815	(56.850.145)	19,25
Jumlah		82.923.528.735	10.271.320.516	(72.652.208.219)	12,39
Beban:					
Usaha	2020	124.520.000	99.107.104	(25.412.896)	79,59
	2021	124.520.000	123.154.133	(1.365.867)	98,90
	2022	233.820.000	226.696.566	(7.123.434)	96,95
	2023	1.397.729.000	3.119.576.155	1.721.847.155	223,19
Di luar Usaha	2020	2.915.883.163	2.142.190.053	(773.693.110)	73,47
	2021	2.915.883.163	2.098.537.089	(817.346.074)	71,97
	2022	2.915.883.163	1.566.451.805	(1.349.431.358)	53,72
	2023	2.915.947.039	1.989.750.014	(926.197.025)	68,24
Jumlah		13.544.185.528	11.365.462.919	(2.178.722.609)	83,91



Dari tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi pendapatan Perusahaan sampai dengan tahun 2023 hanya mencapai 12,39% dari rencana atau Rp10.271.320.516,00. Namun, realisasi beban sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 83,91% dari rencana atau Rp11.365.462.919. Selain itu, target yang ditetapkan pada RKAP lebih kecil daripada yang ditetapkan pada Rencana Bisnis dan belum dilaksanakan revisi atas penetapan target dalam Rencana Bisnis tahun 2020-2024.

e. Realisasi Beban Melebihi Rencana Anggaran

Anggaran dan realisasi pendapatan serta beban Perusahaan sebagai berikut:

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Di atas anggaran/(di bawah anggaran)	
			Rp	%
Pendapatan:				
Usaha	4.519.005.000,00	5.127.965.865,00	608.960.865,00	113,48
Di luar Usaha	34.135.200,00	13.551.815,00	20.583.385,00	39,70
Beban:				
Usaha	1.965.653.100,00	3.119.576.155,00	(1.153.923.055,00)	158,70
Di luar Usaha	2.459.221.182,00	1.989.750.014,00	469.471.168,00	80,91

Rincian pada Lampiran 6.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi pendapatan usaha Perusahaan mencapai 113,48% dari target, tetapi realisasi beban usaha meningkat menjadi 158,70% dari anggaran yang telah ditetapkan. Penyebabnya, Perusahaan belum melakukan pengendalian biaya secara efektif dan efisien.

Direksi Perusahaan agar mengidentifikasi dan mengendalikan biaya yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja melalui perencanaan kegiatan dan anggaran yang efektif dan efisien.

f. Kinerja Perusahaan Belum Dikelola dengan Baik

Perusahaan belum memiliki *Key Performance Indicator* serta belum menetapkan target kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan Perusahaan. Penyebabnya, kurangnya pemahaman manajemen Perusahaan dalam penilaian kinerja pegawai.

Akibatnya, kinerja pegawai tidak dapat diukur dengan jelas.

Direksi Perusahaan agar meningkatkan pemahaman atas penilaian kinerja dan menetapkan indikator dan target kinerja setiap jenjang pegawai.

g. Pengelolaan SDM belum efektif

Pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat komposisi pegawai pada Analisis Beban Kerja tidak terpenuhi dan



struktur organisasi belum diperbaharui berdasarkan susunan direksi terbaru. Rincian pada Lampiran 7.

Penyebabnya, terdapat pengurangan jumlah pegawai Perusahaan.

Akibatnya, terjadi penambahan beban kerja pegawai.

Direksi Perusahaan agar menetapkan struktur organisasi sesuai dengan analisis beban kerja dan susunan Direksi terbaru.

h. Kontribusi Fiskal

Pada tahun 2023, Perusahaan telah memberikan kontribusi fiskal kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kontribusi	Jumlah
1	Pajak Pusat:	74.818.760,00
	PPh Pasal 21	48.306.965,00
	PPh Pasal 22	6.878.115,00
	PPh Pasal 23	450.450,00
	PPh Badan	19.183.230,00
2	Pajak dan Retribusi Daerah:	109.445.559,00
	Pajak Kendaraan Bermotor	11.443.300,00
	Pajak Bumi dan Bangunan	49.206.315,00
	Retribusi	48.795.944,00

Perusahaan pada tahun 2023 telah menyetorkan pajak pemerintah pusat Rp74.818.760,00 dan pajak dan retribusi daerah Rp109.445.559,00.

i. Identifikasi Risiko Kecurangan

Perusahaan telah mengidentifikasi risiko kecurangan (*fraud*) dan telah menyusun daftar risiko. Tidak terdapat keterjadian kecurangan di lingkungan Perusahaan pada tahun 2023, tetapi terdapat keterjadian kecurangan atas pembangunan, pengadaan, pemasangan, serta pelatihan mesin pabrik pupuk NPK pada tahun 2015 yang sedang dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum.



PD Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

NERACA

Per Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
ASET	29,613,521,095.00	34,429,965,738.00
ASET LANCAR	12,003,019,487.00	11,836,255,001.00
Kas dan Bank	1,366,750,276.00	1,288,789,030.00
Kas	1,366,750,276.00	1,288,789,030.00
Bank	0.00	0.00
Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
Deposito	0.00	0.00
Surat Berharga	0.00	0.00
Piutang Usaha (Net)	1,569,168,129.00	1,409,211,129.00
Piutang Usaha	1,569,168,129.00	1,409,211,129.00
Penyisihan Piutang Usaha	0.00	0.00
Piutang Non Usaha (Net)	3,930,664,782.00	4,001,818,542.00
Piutang Non Usaha	3,930,664,782.00	4,001,818,542.00
Penyisihan Piutang Non Usaha	0.00	0.00
Persediaan	4,956,360,000.00	4,956,360,000.00
Persediaan	4,956,360,000.00	4,956,360,000.00
Pembayaran Dimuka	180,076,300.00	180,076,300.00
Pembayaran Dimuka	180,076,300.00	180,076,300.00
INVESTASI JANGKA PANJANG	0.00	0.00
Deposito Berjangka > 1 Tahun	0.00	0.00
Penyertaan	0.00	0.00
Investasi Jangka Panjang Lainnya	0.00	0.00
ASET TETAP	5,863,040,736.00	19,957,947,540.00
Nilai Perolehan	14,745,819,063.00	23,783,551,963.00
Tanah	3,706,195,250.00	3,706,195,250.00
Bangunan/Gedung	6,315,286,000.00	6,377,148,000.00
Peralatan dan Perlengkapan	292,368,313.00	12,636,736,713.00
Kendaraan/Alat Pengangkutan	4,250,418,500.00	856,600,000.00
Inventaris/Perabot Kantor	181,551,000.00	206,872,000.00
Akumulasi Penyusutan	-8,882,778,327.00	-3,825,604,423.00
ASET LAINNYA	11,747,460,872.00	2,635,763,197.00
Aset Tetap dalam Penyelesaian	0.00	0.00
Aset Tidak Berwujud	0.00	0.00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0.00	0.00
Aset Rusak Berat	0.00	0.00
Aset Lain Lainnya	11,747,460,872.00	2,635,763,197.00



PD Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

NERACA

Per Tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
KEWAJIBAN DAN EKUITAS	29,613,521,095.00	34,429,965,738.00
KEWAJIBAN	751,936,190.00	751,936,190.00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	172,850,351.00	172,850,351.00
Hutang Lancar	172,850,351.00	172,850,351.00
Hutang Usaha	0.00	0.00
Hutang Non Usaha	0.00	0.00
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	172,850,351.00	172,850,351.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0.00	0.00
Hutang Pajak	0.00	0.00
Pinjaman Jangka Pendek	0.00	0.00
Pinjaman Bank Jangka Pendek	0.00	0.00
Pinjaman Jangka Pendek Lainnya	0.00	0.00
Kewajiban Jk. Panjang Jatuh Tempo	0.00	0.00
Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo	0.00	0.00
Bunga Pinjaman yang Jatuh Tempo	0.00	0.00
Kewajiban Lain	0.00	0.00
Kewajiban Jk. Pendek Lainnya	0.00	0.00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	579,085,839.00	579,085,839.00
Pokok dan Bunga Pinjaman Yang Belum JT.	0.00	0.00
Hutang Jangka Panjang Lainnya	579,085,839.00	579,085,839.00
KEWAJIBAN LAIN LAIN	0.00	0.00
Pendapatan Yang Ditangguhkan	0.00	0.00
Cadangan Dana	0.00	0.00
E K U I T A S	28,861,584,905.00	33,678,029,548.00
PENYERTAAN MODAL	49,912,130,204.00	49,912,130,204.00
Pemerintah Pusat	0.00	0.00
Pemerintah Provinsi	49,912,130,204.00	49,912,130,204.00
Pemerintah Kab./Kota	0.00	0.00
MODAL LAINNYA	0.00	0.00
Modal Hibah	0.00	0.00
Modal Lainnya	0.00	0.00
CADANGAN	0.00	0.00
Cadangan Umum	0.00	0.00
Cadangan Tujuan	0.00	0.00
LABA DITAHAN (SALDO AKHIR TAHUN LALU)	-21,082,736,810.00	-16,408,494,071.00
LABA/(RUGI) PERIODE BERJALAN	32,191,511.00	174,393,415.00



PD Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN LABA RUGI

Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan 2023

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
PENDAPATAN	5,141,517,680.00	2,067,541,785.00
PENDAPATAN OPERASIONAL	5,127,965,865.00	2,043,507,175.00
Pendapatan Utama	5,127,965,865.00	2,043,507,175.00
Pendapatan Utama	5,127,965,865.00	2,043,507,175.00
Pendapatan Sampingan	0.00	0.00
Pendapatan Sampingan	0.00	0.00
Pendapatan Kemitraan	0.00	0.00
PENDAPATAN NON OPERASIONAL	13,551,815.00	24,034,610.00
BEBAN	5,109,326,169.00	1,893,148,370.00
BEBAN OPERASIONAL	5,107,040,602.00	1,790,590,042.00
Beban Operasional	5,107,040,602.00	1,790,590,042.00
BEBAN NON OPERASIONAL	2,285,567.00	102,558,328.00
LABA RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	32,191,511.00	174,393,415.00
PAJAK PENGHASILAN	0.00	0.00
LABA RUGI BERSIH	32,191,511.00	174,393,415.00



PD Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

U R A I A N	PENYERTAAN MODAL	MODAL LAINNYA	CADANGAN TUJUAN	CADANGAN UMUM	SALDO LABA DITAHAN	JUMLAH
Tahun 2022						
Saldo 1 Januari	49,912,130,204.00	0.00	0.00	0.00	-16,408,494,071.00	33,503,636,133.00
Mutasi	0.00	0.00	0.00	0.00	174,393,415.00	174,393,415.00
Per 31 Desember 2022	49,912,130,204.00	0.00	0.00	0.00	-16,234,100,656.00	33,678,029,548.00
Tahun 2023						
Saldo 1 Januari	49,912,130,204.00	0.00	0.00	0.00	-16,234,100,656.00	33,678,029,548.00
Mutasi	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,816,444,643.00	-4,816,444,643.00
Per 31 Desember 2023	49,912,130,204.00	0.00	0.00	0.00	-21,050,545,299.00	28,861,584,905.00



PD Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Barat
Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD
untuk Tahun Buku 2023

NO.	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	PERHITUNGAN	BOBOT	SKOR
I.	ASPEK KEUANGAN				
1	Return on Equity (ROE)	$\frac{\text{(Laba Setelah Pajak)}}{\text{(Jumlah_Ekuitas)}} \times 100\%$	$\frac{32,191,511}{28,861,584,905} \times 100\%$	0.11%	20
2	Return on Investmenr (ROI)	$\frac{\text{(EBIT + Penyusutan)}}{\text{(Total Aktiva - KDP)}} \times 100\%$	$\frac{32,191,511}{29,613,521,095} \times 100\%$	0.11%	15
3	Cash Ratio	$\frac{\text{(Kas + Setara Kas)}}{\text{(Hutang Lancar)}} \times 100\%$	$\frac{1,366,750,276}{172,850,351} \times 100\%$	790,71%	5
4	Current Ratio	$\frac{\text{(Aktiva Lancar)}}{\text{(Hutang Lancar)}} \times 100\%$	$\frac{12,003,019,487}{172,850,351} \times 100\%$	6.944,17%	5
5	Collection Period	$\frac{\text{(Total Piutang Usaha)}}{\text{(Total Pendapatan Usaha)}} \times 365 \text{ hari}$	$\frac{1,569,168,129}{5,127,965,865} \times 365$	111,69	5
6	Inventory Turnover	$\frac{\text{(Total Persediaan)}}{\text{(Total Pendapatan Usaha)}} \times 365 \text{ hari}$	$\frac{4,956,360,000}{5,127,965,865} \times 365$	352.79	5
7	Total Asset Turnover (TATO)	$\frac{\text{(Total Pendapatan)}}{\text{(Total Aktiva - KDP)}} \times 100\%$	$\frac{5,141,517,680}{29,613,521,095} \times 100\%$	17.36%	5
8	Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset	$\frac{\text{(Total Modal Sendiri)}}{\text{(Total Aktiva)}} \times 100\%$	$\frac{28,861,584,905}{29,613,521,095} \times 100\%$	97.46%	10
	JUMLAH NILAI YANG DIPEROLEH DARI ASPEK KEUANGAN			70	34,5



NO.	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	PERHITUNGAN		BOBOT	SKOR
II.	ASPEK OPERASIONAL					
	Perspektif Pelanggan				7	6.4
1	Tingkat Penyelesaian Keluhan Pelanggan	Jumlah Keluhan Pelanggan terselesaikan <hr/> Jumlah Keluhan Pelanggan	8 <hr/> 8	100.00%	2	2
2	Rasio Pertumbuhan Pelanggan	Jumlah Pelanggan Akhir Tahun - Jumlah Pelanggan Akhir Tahun Sebelumnya <hr/> Jumlah Pelanggan Akhir Tahun Sebelumnya	105 <hr/> 41	256.09%	2	2
3	Indeks Kepuasan Pelanggan	Realisasi Kepuasan Pelanggan <hr/> Target Kepuasan Pelanggan	72 <hr/> 100	71.54%	3	2.4
	Perspektif Proses Bisnis				4	2
1	Kualitas Produk/Jasa yang dihasilkan	Produk/Jasa sesuai Quality Control/SOP <hr/> Jumlah Produk/Jasa	6 <hr/> 10	60.00%	2	1,6
2	Tingkat Penjualan Produk/Jasa yang dihasilkan	Jumlah produk/Jasa yang terjual <hr/> Jumlah Produk/Jasa	6 <hr/> 10	60.00%	2	0.4
	Perspektif Learning and Growth				4	3.2
1	Penggunaan TI dalam penyediaan Produk/Jasa kepada Pelanggan	Jumlah Pemanfaatan Teknologi Informasi x 100 % <hr/> Jumlah Proses Bisnis Utama Badan Usaha	2 <hr/> 10	20.00%	2	2
2	Pencapaian Target Biaya Pengembangan	Realisasi Biaya Pengembangan <hr/> Realisasi Beban Usaha	0 <hr/> 3,119,576,155	0.00%	1	0.2
3	Rasio Diklat Pegawai	Jumlah Pegawai yang ikut Diklat x 100% <hr/> Jumlah Pegawai	6 <hr/> 9	66.66%	1	1
JUMLAH NILAI YANG DIPEROLEH DARI ASPEK OPERASIONAL					15	11,6



NO.	INDIKATOR	FORMULA INDIKATOR	TANGGAL	SKOR
III.	ASPEK ADMINISTRASI			
1	Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik telah disampaikan kepada Pemegang Saham/Kepala Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Bila pengajuan sampai dengan akhir bulan ke - 4 sejak tahun buku ditutup 10 - Bila pengajuan sampai dengan akhir bulan ke - 5 sejak tahun buku ditutup 5 - Bila pengajuan lebih dari akhir bulan ke - 5 sejak tahun buku ditutup 0 	Kamis, Mei 18, 2023	5
2	Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAP) telah disahkan sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Bila disahkan 1 bulan atau lebih cepat 5 - Bila disahkan kurang dari 1 bulan 0 	Jumat, Oktober 21, 2022	5
JUMLAH NILAI YANG DIPEROLEH DARI ASPEK ADMINISTRASI				10
TOTAL SKOR				56,1
KATEGORI				KURANG SEHAT
PREDIKAT				BBB



PD Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat
Prov. Kalimantan Barat
TAHUN 2023

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Kebijakan GCG:

Keberadaan Kebijakan GCG	Masih Proses	Jumlah Personil Direksi:	2 orang
Code of Corporate Governance	Ada	Jumlah Personil Dewas:	2 orang
Code of Conduct	Belum Ada		
Board Manual	Belum Ada		
Internal Audit Charter	Belum Ada		
Committee Audit Charter	Belum Ada		

Penilaian Implementasi GCG:

Skor	54
Predikat	Kurang Baik (≤ 60)
Area of Improvement	

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MR)

Komite/Pengelola Risiko	Belum Ada	Pengelola Risiko :	0 orang
Kebijakan MR	Ada	Telah mengikuti sertifikasi MR:	0 orang
Risk Register	Tapi Belum Dimutakhirkan		
Pelaksanaan Mitigasi Risiko	Tidak Dilakukan		
Rencana Mitigasi Risiko	Belum Ada		

Penilaian Implementasi MR:

Maturitas Penerapan MR	Belum Pernah Dinilai
Skor Tingkat Maturitas	

SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI)

Piagam Internal Audit (IAC) Belum ada

Piagam Internal Audit telah memuat bentuk jasa penjaminan dan konsultasi SPI sbb:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Audit Kepatuhan | <input type="checkbox"/> 5. Audit atas 3E/ Audit Kinerja |
| <input type="checkbox"/> 2. Self Assessment GCG | <input type="checkbox"/> 6. Adanya kewenangan SPI untuk memberikan opini atas tata kelola, MR, dan pengendalian keseluruhan Perusahaan |
| <input type="checkbox"/> 3. Tujuan Audit Tertentu | <input type="checkbox"/> 7. Internal Audit sebagai agen perubahan |
| <input type="checkbox"/> 4. Kegiatan Penjaminan Lainnya | |

Audit universe	Belum ada
Perencanaan berbasis Risiko	Belum Ada
Level Kapabilitas SPI	Belum Pernah Dinilai
Jumlah Personil SPI	1
Akses terhadap informasi BUMD	Belum ada
Skor Tingkat Kapabilitas	Belum ada



Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Rincian Akun	Target RKAP (2023)	Realisasi (2023)	Capaian (%)
Pendapatan Usaha			
Pabrik Pupuk NPK	0,00	0,00	0,00%
Sewa Armada Air	480.000.000,00	401.000.000,00	83,54%
Sewa Kios+ Sewa Ruang ATM	1.022.400.000,00	568.650.000,00	55,62%
Unit Usaha Travel & PPOB	18.000.000,00	5.716.242,00	31,76%
Unit Usaha ATK, Percetakan	6.000.000,00	15.000,00	0,25%
Usaha Lumbung Pangan	360.000.000,00	3.950.994.859,00	1097,50%
Usaha Parkir dan Sewa Lahan	1.482.600.000,00	162.101.764,00	10,93%
Usaha Uji Mutu Kratom	450.000.000,00	39.488.000,00	8,78%
Usaha Pengelolaan Pabrik Oli Limbah (B3)	700.005.000,00	0,00	0,00%
Usaha Air Minum Dalam Kemasan	0,00	0,00	0,00%
Total Pendapatan Usaha	4.519.005.000,00	5.127.965.865,00	113,48%
Beban Usaha			
Pabrik Pupuk NPK	20.700.000,00	19.707.500,00	95,21%
Sewa Armada Air	46.200.000,00	0,00	0,00%
Sewa Kios	76.200.000,00	75.133.200,00	98,60%
Sewa Ruang ATM	2.400.000,00	0,00	0,00%
Unit Usaha Travel & PPOB	600.000,00	0,00	0,00%
Unit Usaha ATK, Percetakan	1.200.000,00	0,00	0,00%
Usaha Lumbung Pangan	60.000.000,00	3.024.735.455,00	5041,23%
Usaha Parkir dan Sewa Lahan	1.108.553.100,00	0,00	0,00%
Usaha Uji Mutu Kratom	30.000.000,00	0,00	0,00%
Usaha Pengelolaan Pabrik Oli Limbah (B3)	619.800.000,00	0,00	0,00%
Usaha Air Minum Dalam Kemasan	0,00	0,00	0,00%
Total Beban Usaha	1.965.653.100,00	3.119.576.155,00	158,70%
Pendapatan Non Usaha			
Pendapatan Lain-Lain	34.135.200,00	13.551.815,00	39,70%
Total Pendapatan Non Usaha	34.135.200,00	13.551.815,00	39,70%
Beban Non Usaha			
Beban Administrasi Umum	2.457.943.662,00	1.987.464.447,00	80,86%
Beban Lain-lain	1.277.520,00	2.285.567,00	178,91%
Total Beban Non Usaha	2.459.221.182,00	1.989.750.014,00	80,91%
Laba/Rugi	128.265.918,00	32.191.511,00	25,10%
Penyetoran Laba sebagai PAD (50%)	64.132.959,00	0,00	0



Analisis Beban Kerja

No	Indikator Analisis	Analisis Beban Kinerja Pegawai (Maret 2023)	Realisasi di Perusahaan (SOTK No. 453 Tahun 1996)	Keterangan
1	Jumlah SDM Perusahaan	Dewan Pengawas: 2 Direktur Utama: 1 Direktur Teknik dan Pemasaran: 1 Direktur Adm & Keuangan: 1 Karyawan Tetap: 6	(Periode 2019-2023) SK Gubernur No. 1367/EKON/2019 Dewan Pengawas: 2 SK Gubernur No. 1368/EKON/2019 Direktur Utama: 1 Direktur Teknik dan Pemasaran: 1 Direktur Adm & Keuangan: 1 Karyawan Tetap: 2 Karyawan Kontrak: 5 (Periode 2023-2027) SK Gubernur No. 1796/EKON/2023 Dewan Pengawas: 2 SK Gubernur No. 1797/EKON/2019 Direktur Utama: 1 Direktur Perusda: 1 Karyawan Tetap: 2 Karyawan Kontrak: 4	Jumlah SDM sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam ABK
2	Jabatan sesuai SOTK Perusahaan	1. Dewan Pengawas 2. Direktur Utama 3. SPI 4. Direktur Teknik dan Pemasaran -Kepala Bidang Teknik: (Staff Perizinan, Investasi, dan Kerjasama) -Kepala Bidang Pemasaran (Staff Pemasaran) 5. Direktur Adm & Keuangan -Kepala Bidang Adm dan Personalia (Staff Adm dan Umum) (Staff Keamanan dan Office Boy) -Kepala Bidang Keuangan dan Perpajakan (Staff Keuangan dan Kasir)	1. Dewan Pengawas 2. Direktur Utama 3. SPI 4. Direktur Teknik dan Pemasaran -Divisi Percetakan, Tk. Buku, ATK, PBJ -Divisi Angkutan, Galangan dan Perbengkelan -Divisi Pemborongan Konstruksi & Perumahan -Divisi Perdagangan dan Pertambangan -Divisi Pertanian dan Kehutanan 5. Direktur Adm & Keuangan -Bidang Umum dan Administrasi -Bidang Keuangan dan Litbang	ABK tidak sesuai dengan SOTK 453 Tahun 1996 tentang SOTK Perusda Aneka Usaha Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tanggal 25 September 1996



Analisis Beban Kerja

No	Indikator Analisis	Analisis Beban Kinerja Pegawai (Maret 2023)	Realisasi di Perusahaan (SOTK No. 453 Tahun 1996)	Keterangan
3	Apakah terdapat Jabatan yang kosong di Perusahaan?		1. Dewan Pengawas (ada) 2. Direktur Utama (ada) 3. SPI (ada) 4. Direktur Teknik dan Pemasaran (ada) -Kepala Bidang Teknik: (kosong) (Staff Perizinan, Investasi, dan Kerjasama) (ada) -Kepala Bidang Pemasaran: (kosong) (Staff Pemasaran) (ada) 5. Direktur Adm & Keuangan (ada) -Kepala Bidang Adm dan Personalia (ada) (Staff Adm dan Umum) (ada) (Staff Keamanan dan Office Boy) (ada) -Kepala Bidang Keuangan dan Perpajakan (ada) (Staff Keuangan dan Kasir) (kosong)	Terdapat 3 jabatan yang kosong sesuai dengan ABK, yaitu: 1. Kepala Bagian Teknik 2. Kepala Bidang Pemasaran 3. Staff Keuangan dan Kasir
4	Apakah terdapat Jabatan yang dirangkap oleh orang yang sama?			Cornelia Arylucianti, SE. MM. Ak. Kepala Bidang Keuangan dan Perpajakan merangkap sebagai SPI
5	Apakah tugas dan wewenang masing-masing jabatan sudah ditetapkan dengan jelas? Bagaimana pelaksanaannya?			Tugas dan wewenang masing-masing jabatan telah diuraikan dengan jelas di dalam ABK
6	Apakah persyaratan minimal masing-masing jabatan sudah ditetapkan dengan jelas? Bagaimana pelaksanaannya?			Persyaratan minimal masing-masing jabatan telah ditetapkan dengan jelas di dalam ABK, namun dalam pelaksanaannya terdapat kekosongan di beberapa jabatan



Rencana Aksi dan Komitmen Tindak Lanjut

No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	<i>Action Plan</i> dan Komitmen
1	Empat indikator (ROE, ROI, Perputaran Total Aset dan Rasio Modal Sendiri terhadap Aset) pada aspek keuangan belum memperoleh nilai maksimal.	Direksi Perusda Aneka Usaha agar meningkatkan kinerja aspek keuangan dengan melakukan efisiensi dan pengendalian terhadap biaya operasional Perusahaan.	Akan menindaklanjuti dengan berupaya melakukan efisiensi terhadap biaya operasional pada kegiatan operasi pasar.
2	Pada Tahun 2023, terdapat penurunan capaian kinerja pada aspek operasional.	Direksi Perusda Aneka Usaha agar: a. Meningkatkan kinerja operasional dengan peningkatan kerapian dan kebersihan fasilitas mushola dan wastafel serta meningkatkan pelayanan petugas kepada pelanggan unit usaha sewa kios. b. Melakukan research and development dalam rangka rencana pengembangan bisnis yang menguntungkan.	Akan menindaklanjuti rekomendasi dengan: a. Melakukan pembersihan fasilitas mushola dan wastafel serta meningkatkan pelayanan petugas. b. Melakukan pengembangan bisnis pada masing-masing unit usaha.
3	Perusahaan belum menerapkan tata kelola yang baik, khususnya pada parameter komitmen, kebijakan, dewan pengawas, dan SPI.	Direksi Perusda Aneka Usaha agar meningkatkan aspek tata kelola Perusahaan dengan: a. Penyusunan dan Penandatanganan Pakta Integritas setiap awal tahun selama masa jabatan. b. Rekrutmen pegawai untuk meminimalisir tumpang tindih pekerjaan, sehingga dapat ditunjuk tim yang menangani ketaatan aturan GCG. c. Penyusunan <i>Board manual</i> dan mekanisme pelaporan atas dugaan pelanggaran/kecurangan. d. Berkonsultasi dengan Dewan Pengawas terkait implementasi manajemen risiko dan prinsip tata kelola yang baik.	Akan menindaklanjuti rekomendasi dengan: a. Menyusun dan menandatangani Pakta Integritas setiap awal tahun. b. Melakukan rekrutmen pegawai dengan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan. c. Menyusun <i>Board manual</i> dan mekanisme pengaduan pelanggaran/kecurangan. d. Menyelenggarakan rapat dengan Dewan Pengawas terkait implementasi manajemen risiko dan prinsip tata kelola Perusahaan.
4	Penerapan manajemen risiko pada Perusahaan masih dalam kategori “Kurang” yang terlihat dari belum ditunjuk pegawai yang mengelola manajemen risiko, belum terdapat kerangka manajemen risiko, rencana penanganan risiko dan tidak dilakukan monitoring/reviu manajemen risiko.	Direksi Perusda Aneka Usaha agar meningkatkan aspek manajemen risiko Perusahaan dengan: b) Penetapan Surat Keputusan pengelola manajemen risiko. c) Penyusunan dokumen yang diperlukan dalam rangka memenuhi infrastruktur manajemen risiko khususnya terkait dengan kerangka kerja, rencana penanganan risiko dan menetapkan risk owner. d) Monitoring/reviu dan menyusun laporan hasil monitoring/reviu atas pelaksanaan manajemen risiko Perusahaan.	Akan menindaklanjuti rekomendasi dengan: a. Menunjuk dan menetapkan pegawai untuk mengelola manajemen risiko. b. Menyusun dokumen pendukung infrastruktur manajemen risiko. c. Melaksanakan monitoring pelaksanaan manajemen risiko dan menuangkan hasil monitoring pada laporan tahunan.



No	Hasil Evaluasi	Rekomendasi	Action Plan dan Komitmen
5	SPI yang telah ditetapkan belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.	Direksi Perusda Aneka Usaha agar meningkatkan aspek pengendalian Perusahaan dengan: a. Fasilitasi pegawai yang ditunjuk sebagai SPI untuk mengikuti Pendidikan/pelatihan terkait pengendalian internal. b. Penyusunan <i>Internal Audit Charter</i> yang memuat pengawasan <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> . c. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko, pedoman pelaksanaan dan indikator pengukuran kinerja.	Akan menindaklanjuti rekomendasi dengan: ii. Memfasilitasi Pendidikan/pelatihan kepada pegawai yang ditunjuk sebagai SPI iii. Melakukan penyusunan <i>Internal Audit Charter</i> , PKPT, pedoman pelaksanaan dan indikator pengukuran kinerja.
6	Pengelolaan sumber daya manusia Perusahaan belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari struktur organisasi yang tidak sesuai dengan analisis beban kerja, terdapat jabatan yang kosong dan terjadi tumpang tindih pekerjaan.	Direksi Perusda Aneka Usaha agar melakukan: a. Penetapan Struktur Organisasi sesuai dengan analisis beban kerja dan susunan Direksi terbaru. b. Rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan pada analisis beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perusahaan.	Akan menindaklanjuti rekomendasi dengan: a. Menyusun dan mengajukan penetapan struktur organisasi dengan susunan terbaru. b. Melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

